

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022



INSPEKTORAT
DAERAH



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Ridho dan Karunia-Nya, Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 tepat waktu. LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu tahun 2022 serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 merupakan hasil yang telah dicapai secara maksimal. Kami sangat menyadari bahwa laporan ini masih perlu untuk penyempurnaan, oleh sebab itu segala kritik dan saran untuk lebih baiknya laporan ini akan kami terima dengan terbuka dan penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan serta dalam penetapan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang, khususnya tahun 2022, akan memberikan hasil yang lebih baik, sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat dan



berbagai pihak yang terkait. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Tasikmalaya, ³¹ Januari 2023

Plt. Inspektur Daerah



H. AGUS BAHTIAR, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 196602111992021001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban suatu Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Instansi pada Pemerintah Daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Instansi Pemerintah Daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 merupakan LKIP kedua dalam kurun waktu Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Dari sasaran tersebut kemudian disusun 3 (tiga) program yang diimplementasikan dalam 11 (sebelas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Penetapan kegiatan dan sub kegiatan selain mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya juga berdasarkan arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

Dalam LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 ini disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi, yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, telah dapat dilaksanakan /diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Pejabat Struktural di Lingkungan Inspektorat Daerah



Kabupaten Tasikmalaya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan Aparatur Sipil Negara dalam rangka mendorong ke arah profesionalisme dan peningkatan kualitas kinerja.

3. Dalam pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, telah dilaksanakan semuanya, namun tingkat keberhasilan dari salah satu sasaran belum berhasil diwujudkan secara optimal.
4. Dari beberapa sasaran yang telah dicapai, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat output, sedangkan yang diharapkan adalah pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah organisasi belum secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi.....	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana.....	4
D. Isu Aktual	8
E. Sistematika Penyusunan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis.....	10
1. Tujuan dan Sasaran Menengah Inspektorat Daerah..	11
B. Perjanjian Kinerja.....	12
1. Program dan Kegiatan.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	20
2. Capaian Indikator Kinerja Utama	23
3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	24
4. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	25
B. Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP	45
A. Tinjauan Umum	45
B. Kendala-Kendala	46
C. Strategi Pemecahan Masalah.....	47
LAMPIRAN	



BAB I *Pendahuluan*

A. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Inspektorat Daerah merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa serta tugas lain yang diberikan Bupati, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3). Untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah. Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi



penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas Inspektorat Daerah dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tercantum dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

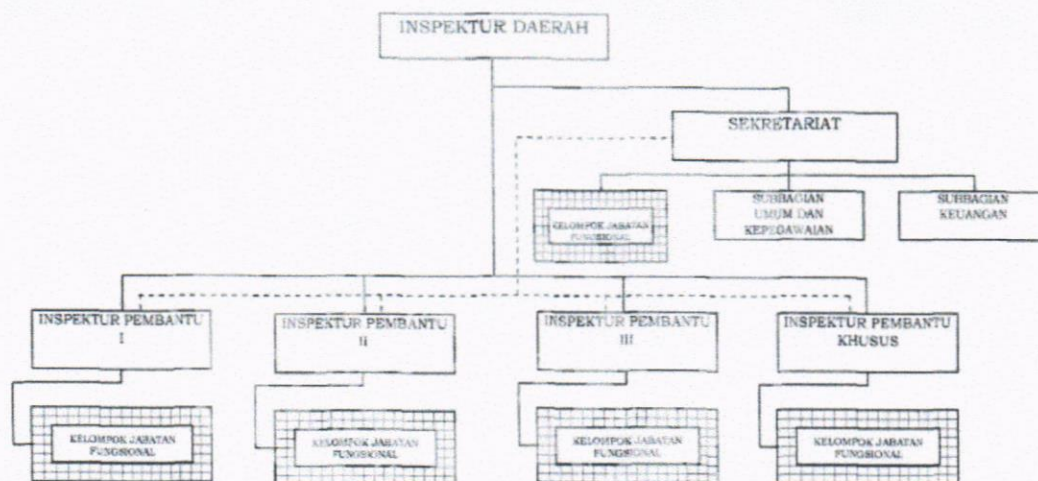
Susunan organisasi Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.



- c. Inspektur Pembantu I terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Inspektur Pembantu II terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Inspektur Pembantu III terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Inspektur Pembantu IV terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Tasikmalaya



C. Aspek Kepegawaian dan sarana prasarana

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2022 sebanyak 54 (lima puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) orang laki-laki dan 22 (dua puluh dua) orang perempuan dengan status kepegawaian dan strata/jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga S-2. Berikut kami sampaikan data kepegawaian seperti terlihat pada tabel berikut ini:

- ❖ Komposisi pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menurut tingkat pendidikan



No	Status Kepegawaian	SMA		D3		S1		S2		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	CPNS	-	-	-	-	8	4	-	-	12
2	PNS	3		-	1	18	8	7	5	42

- ❖ Komposisi pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Status dan Pangkat/Golongan Pegawai

No	Status Kepegawaian	II				III				IV				Jumlah
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	CPNS	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
2	PNS	-	-	1	3	5	2	9	8	8	4	2	-	42

- ❖ Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan latihan jabatan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Diklat PIM Tk. IV	-
2	Diklat PIM Tk. III	1
3	Diklat PIM Tk. II	-
JUMLAH		1

- ❖ Komposisi pegawai berdasarkan jabatan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
A.	Jabatan Struktural	
	1. Eselon II	-
	2. Eselon III	1
	3. Eselon IV	1
B	Jabatan Fungsional Auditor	
	1. Auditor Madya	4
	2. Auditor Muda	9



	3. Auditor Pertama	2
C	Jabatan Fungsional Pengawas	
	1. PPUPD Madya	8
	2. PPUPD Muda	3
	3. PPUPD Pertama	1

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 didukung dengan aspek sarana dan prasarana sebagai berikut:

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	13
2	Kendaraan Roda 2	24
3	Mesin TIK	1
4	Mesin Fotocopy	1
5	Lemari Kayu	16
6	Rak Kayu	8
7	Filling Cabinet Besi	7
8	Alat Penghancur Kertas	9
9	Mesin Absensi	1
10	LCD Proyektor	2
11	Papan Nama Instansi	1
12	Meja Kerja Kayu	2
13	Meja Rapat	23
14	Meja Podium	2
15	Kursi Rapat	28
16	Kursi Putar	24
17	Partisi	1
18	Meubeuleur lainnya	3
19	Mesin Pemotong Rumput	1



20	AC	4
21	AC Split	1
22	Kitchen Set	1
23	Televisi	3
24	Loudspeaker	4
25	Wireless	3
26	Camera Video	5
27	Mimbar/Podium	1
28	Gordyn/Kray	1
29	Alat Rumah Tangga lain-lain	5
30	Alat Pemadam/Portable	6
31	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	18
32	Meja Kerja Pejabat lain-lain	15
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
34	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4
35	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	26
36	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	73
37	Kursi Tamu	1
38	Lemari Buku Arsip	2
39	Microphone/Wireless Mic	20
40	Peralatan Studio Audio Lainnya	1
41	Slide Projector	2
42	Mixer PVC	1
43	Layar Film/Projector	4
44	Telephone (PABX)	1
45	Telephone Mobile	22



46	Faximile	1
47	Reciever STL/UHF	3
48	Distiling Apparatus	1
49	Meja Kerja	16
50	Papan Panel	1
51	Local Area Network (LAN)	1
52	Laptop	34
53	Notebook	43
54	Hardisk	1
55	Peralatan mainframe lainnya	1
56	Scanner (Peralata Mini Komputer)	2
57	Monitor	3
58	Printer	23
59	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2
60	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2
61	Server	1
62	Peralatan Jaringan Lainnya	1
63	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1



D. Isu Aktual

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengidentifikasi dan respon terhadap isu aktual yang ada dengan berbagai kebijakan serta tindakan yang tepat. Secara umum isu aktual dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu aktual yang melingkupi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penugasan mandatory: APIP melakukan pengawasan atas penugasan dari pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas: APIP melakukan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri Zona Integritas;
3. Pelaksanaan aksi nasional pencegahan korupsi: APIP melakukan penjaminan atas laporan aksi nasional pencegahan korupsi setiap triwulannya;
4. Pengawasan keuangan desa: APIP sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan keuangan desa termasuk didalamnya pengawasan dana desa;
5. melanjutkan agenda penguatan APIP daerah: Kementerian Dalam Negeri melanjutkan agenda penguatan APIP terhadap aspek kelembagaan, anggaran dan SDM

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat beberapa permasalahan yang bisa dijadikan bahan garapan pada tahun 2023 sehingga diharapkan pemeriksaan akan lebih baik dan dapat mengurangi penyimpangan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan mengurangi terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan serta berkurangnya korupsi, kolusi dan nepotisme.



E. Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang kedudukan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, aspek kepegawaian dan sarana prasarana, isu aktual, dan sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini disajikan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN



BAB II *Pencanaan Kinerja*

A. Rencana Strategis

Pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah akan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Arah kebijakan tersebut terkait dengan peningkatan reformasi birokrasi untuk Pemerintahan yang baik dan efektif.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

**” DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI,
BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**

Dalam rangka pencapaian visi, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan



kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu terdapat pada misi ke-2 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2021-2026.

“Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional”

Untuk mewujudkan Misi ke-2 tersebut, terdapat tujuan RPJMD yaitu: **Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, dan dari tujuan tersebut dapat menjadi acuan bagi Inspektorat Daerah dalam penyusunan Tujuan dan Sasaran Menengah Inspektorat Daerah.

1. Tujuan dan Sasaran Menengah Inspektorat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Setelah tujuan ditetapkan, Inspektorat Daerah dapat mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1-5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuan yang tertuang dalam Renstra, yaitu sebagai berikut:

“Meningkatkan Pengawasan, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja”

Dengan indikator: Leveling Maturitas SPIP

Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka disusun sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi



Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif.

Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai.

Adapun Sasaran Inspektorat Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator:

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti

2. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Indikator:

Hasil Leveling Lembaga Pengawasan

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator:

Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

B. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa perjanjian kinerja menyajikan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan



instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan melalui perjanjian kinerja, dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Komponen Perjanjian Kinerja meliputi hal-hal sebagai berikut: sasaran dan indikator kinerja, target sasaran, program/kegiatan/sub kegiatan dan pagu anggaran. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 secara jelas sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

SASARAN		SATUAN	TARGET 2022
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	% 83
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level 3
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin 55



Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD



- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c) Reviu Laporan Kinerja
 - d) Reviu Laporan Keuangan
 - e) Pengawasan Desa
 - f) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu



- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - b) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - b. Pendampingan dan Asistensi
 - a) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tabel 2.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.668.143.490
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.000.000
a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000
b)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.348.458.172
a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.348.458.172
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	582.500.000
a)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	345.500.000
b)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	237.000.000
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.281.935.800



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
a)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000
b)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.000.000
c)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	181.839.200
d)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	48.000.000
e)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	112.096.600
f)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000
g)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	241.500.000
a)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	241.500.000
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.669.518
a)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.229.518
b)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.440.000
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	741.080.000
a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499.430.000
b)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.650.000
c)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.378.566.000
A	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.031.856.000
a)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	247.850.000
b)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	215.290.000
c)	Reviu Laporan Kinerja	50.000.000
d)	Reviu Laporan Keuangan	142.646.000
e)	Pengawasan Desa	146.070.000
f)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	230.000.000
B	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	346.710.000
a)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	200.000.000
b)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	146.710.000



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	904.650.000
A	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	370.210.000
a)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	248.570.000
b)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	121.640.000
B	Pendampingan dan Asistensi	534.440.000
a)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	163.000.000
b)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	121.440.000
c)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	250.000.000
TOTAL		16.951.359.490



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas merupakan kewajiban suatu badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja dan atau tindakannya kepada pihak yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban serta penjelasan atas hasil tindakannya.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



1) Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu:

❖ **Data Internal**

Data yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan lainnya.

❖ **Data Eksternal**

Data yang digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.



Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target), baik dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan maupun Pengukuran Pencapaian Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

- (a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

- (b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi seperti terlihat pada Tabel 3.1.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output baik rencana maupun



realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Mempertimbangkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya belum melaksanakan Standar Analisis Biaya (SAB) maka pengukuran efisiensi dilakukan dengan metode pengukuran efisiensi sederhana.

Melihat dari realisasi pencapaian sasaran akan diperoleh nilai atas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Adapun penilaian tersebut berdasarkan kepada hasil pengukuran skala ordinal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Kondisi	Keterangan
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 55	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Efisiensi terjadi karena realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan target, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (*outcomes*). Selain itu, analisis dilakukan terhadap setiap perbedaan



kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

2) Capaian Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		
					Target	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	83,73	83	88,92	107,13
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level	2	3	2	66,67
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	55	56,34	102,44



Indikator kinerja di Inspektorat Daerah yang mendukung mewujudkan Misi 2 (dua) Kabupaten Tasikmalaya dapat ditunjukkan melalui persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP, capaian tingkat kapabilitas APIP dan nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Dari indikator-indikator sasaran pada tabel di atas terdapat satu indikator yang belum memiliki capaian kinerja pada tahun sebelumnya, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, sehingga realisasi pencapaian pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pencapaian tahun 2021.

3) Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian kinerja sasaran strategis

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Baik	2
2	Tinggi	0
3	Sedang	1
4	Rendah	0
5	Sangat Rendah	0

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:



Tabel 3.5
Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	≤ 55	$51 \leq 65$	$66 \leq 75$	$76 \leq 90$	$91 \leq 100$
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	107,13					Sangat baik
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	1	66,67					Sedang
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1	102,44					Sangat baik

4) Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran 1 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 107,13% dengan predikat **Sangat Baik**.



Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.6
Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	83	88,92	107,13

Target kinerja Inspektorat Daerah dalam persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2022 terealisasi sebesar 88,92% dari target sebesar 83%, maka realisasi telah melampaui target yang diharapkan.

b. Perbandingan antara realisasi tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.7
Tabel Realisasi Indikator Sasaran 1 pada Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Persentase Peningkatan (%)
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	83,79	88,92	5,13

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup baik untuk realisasi pencapaian tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi pencapaian tahun 2021 yaitu peningkatan sebesar 5,13%.



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah

Tabel 3.8
Tabel Realisasi Indikator Sasaran 1 pada Tahun 2022
dibandingkan dengan Target pada Akhir Periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra	Pencapaian (%)
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	88,92	87	102,21

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada tahun 2022 sudah sangat baik, karena pencapaian target pada tahun 2022 sudah mencapai 88,92% dari target akhir Renstra yang memiliki target 87%.

- d. Analisis penyebab peningkatan /penurunan kinerja

Penyebab terjadinya peningkatan kinerja untuk indikator sasaran 1 ini adalah terdapat peningkatan kualitas dan kuantitas APIP dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut. Selain itu juga adanya peningkatan komitmen dari manajemen puncak terkait pentingnya penyelesaian rekomendasi dari hasil pemeriksaan APIP.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.9
Tabel Realisasi Indikator Sasaran 1 dan Realisasi Anggaran yang Menunjang Indikator

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	83	89,68	107,13	1.378.566.000	795.274.199	57,69

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase pencapaian indikator telah efisien, karena pencapaian realisasi indikator



mencapai 107,13% sedangkan realisasi anggaran hanya mencapai 57,69%.

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - (a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - (b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - (c) Reviu Laporan Kinerja
 - (d) Reviu Laporan Keuangan
 - (e) Pengawasan Desa
 - (f) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - (a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - (b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sasaran 2:

Meningkatnya Kapabilitas APIP

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran penguatan fungsi pengawasan dalam mendukung peningkatan Kapabilitas APIP yang optimal dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 66,67% dengan predikat **Sedang**.

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini



Tabel 3.10
Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Hasil Leveling Lembaga Pengawasan	Level	3	2	66,67

Target kinerja Inspektorat Daerah untuk Leveling Kapabilitas APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu berada di level 3 dengan capaian target sebesar 66,67%.

b. Perbandingan antara realisasi tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.11
Tabel Realisasi Indikator Sasaran 2 pada
Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Persentase Peningkatan (%)
1	Hasil Leveling Lembaga Pengawasan	Level	2	2	0

Tabel di atas, menunjukkan bahwa realisasi pada tahun 2022 tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi pencapaian tahun 2021, dikarenakan pada tahun 2022 Inspektorat Daerah memperoleh hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan skor sebesar 2,510 (Level 2) sesuai Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Nomor: LHP-794/PW10/6/2022 tanggal 6 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.12
Tabel Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

No	Elemen	Hasil Evaluasi
1	Pengelolaan SDM	Level 3
2	Praktik Profesional	Level 2
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Level 3
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	Level 3
5	Struktur Tata Kelola	Level 3
6	Peran dan Layanan	Level 2
	Simpulan	Level 2

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah

Tabel 3.13
Tabel Realisasi Indikator Sasaran 2 pada Tahun 2022
dibandingkan dengan Target pada Akhir Periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra	Pencapaian (%)
1	Hasil Leveling Lembaga Pengawasan	Level	2	4	50

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada tahun 2022 sudah tercapai sebesar 50% dari target jangka menengah yang terdapat pada Renstra, dengan target akhir yaitu Kapabilitas APIP Level 4.

- d. Analisis penyebab peningkatan /penurunan kinerja

Penilaian Kapabilitas APIP merupakan penilaian yang dilakukan berdasarkan usulan dan kesiapan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya Leveling Kapabilitas APIP Level 3 dikarenakan:

- Inspektorat Daerah dalam melaksanakan perencanaan pengawasan belum mempertimbangkan penilaian maturitas manajemen risiko perangkat daerah tetapi baru mengacu



kepada faktor risiko yang digunakan untuk menentukan prioritas program pada perangkat daerah yang diaudit serta belum mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya (SDM, waktu, dana).

- Inspektorat Daerah belum mengembangkan sistem dan prosedur untuk menindaklanjuti hasil *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) berupa pelaksanaan rekomendasi perbaikan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan intern dan kesesuaian dengan standar.
- Inspektorat Daerah belum optimal dalam melaksanakan perencanaan pengawasan berupa pelaksanaan penilaian SPI, kendali mutu serta survey pendahuluan dan pelaksanaan pengawasan berupa SDM yang memiliki kompetensi terkait pelaksanaan pengawasan.
- Inspektorat Daerah belum memberikan jasa konsultasi dengan SDM yang memiliki kompetensi audit internal atau jasa konsultasi yang relevan dilakukan secara *due profesional care* serta memberikan atensi (*early warning*) terkait kegiatan jasa konsultasi yang memiliki risiko.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.14
Tabel Realisasi Indikator Sasaran 2 dan Realisasi Anggaran yang Menunjang Indikator

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hasil Leveling Lembaga Pengawasan	2	3	66,67	904.650.000	650.154.173	71,87

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase pencapaian indikator belum efisien, karena pencapaian realisasi indikator



sebesar 66,67% sedangkan realisasi anggaran mencapai 71,87%.

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja sasaran, adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - (a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - (b) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - b) Pendampingan dan Asistensi
 - (a) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - (b) Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - (c) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sasaran 3:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 102,44% dengan predikat **Sangat Baik**.



a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.15
Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	55	56,34	102,44

Berdasarkan tabel di atas, realisasi pencapaian kinerja Inspektorat Daerah dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 telah melebihi target yaitu sebesar 102,44%.

b. Perbandingan antara realisasi tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.16
Tabel Realisasi Indikator Sasaran 3 pada Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Persentase Peningkatan (%)
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	n/a	56,34	100

Indikator 3 ini merupakan indikator yang baru dicanangkan pada periode Renstra Tahun 2021-2026, sehingga indikator ini belum memiliki capaian pada tahun 2021. Walaupun seperti itu, realisasi pada tahun 2022 sudah tercapai sesuai target, sehingga jika dibandingkan dengan tahun lalu realisasi pencapaian sudah sebesar 100%.



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah

Tabel 3.17
Tabel Realisasi Indikator Sasaran 3 pada Tahun 2022
dibandingkan dengan Target pada Akhir Periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra	Pencapaian (%)
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	56,34	67	84,09

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada tahun 2022 sudah sangat baik karena pada tahun 2022 pencapaian sudah mencapai 84,09% dari target akhir Renstra yang memiliki target Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 67 Poin.

- d. Analisis penyebab peningkatan /penurunan kinerja

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan semakin optimal jika diimbangi dengan peningkatan komitmen dari pimpinan instansi untuk melakukan pecegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, meningkatkan manajemen kinerja pemerintah, penataan kelembagaan, tata kelola pemerintahan, manajemen SDM dan efisiensi anggaran. Selain itu dalam peningkatan manajemen Pelayanan Publik harus diimbangi dengan pencegahan terjadinya praktek pungutan liar.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.18
Tabel Realisasi Indikator Sasaran 3 dan Realisasi Anggaran yang Menunjang Indikator

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55	56,34	102,44	14.668.143.490	11.967.041.566	81,59



Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang mendukung indikator memiliki capaian sebesar 102,44%, dan anggaran ini cukup efisien karena dapat menghasilkan pencapaian indikator melebihi sebesar 100%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - (b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - (c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - (e) Fasilitasi Kunjungan Tamu



- (f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (g) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - (c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Realisasi Anggaran

Penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2022, yaitu untuk mencapai 3 sasaran strategis, dianggarkan sebesar Rp. 16.951.359.490 dan terealisasi sebesar Rp. 13.412.469.938 atau 79,12%. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut:



Tabel 3.19
Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.668.143.490	11.967.041.566	81,59
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.000.000	66.841.500	60,77
a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000	44.168.500	55,21
b)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	22.673.000	75,58
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.348.458.172	9.329.201.130	82,21
a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.348.458.172	9.329.201.130	82,21
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	582.500.000	269.074.133	46,19
a)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	345.500.000	41.080.133	11,89
b)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	237.000.000	227.994.000	96,20
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.281.935.800	985.176.247	76,85
a)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	80.000.000	100,00
b)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.000.000	160.000.000	100,00
c)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	181.839.200	181.839.200	100,00
d)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	48.000.000	48.000.000	100,00
e)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	112.096.600	112.085.000	99,99
f)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000	255.780.047	51,16
g)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	147.472.000	73,74
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	241.500.000	239.295.050	99,09



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Daerah			
a)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	241.500.000	239.295.050	99,09
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.669.518	347.165.006	95,72
a)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.229.518	118.935.006	89,27
b)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.440.000	228.230.000	99,47
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	741.080.000	730.288.500	98,54
a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499.430.000	489.648.500	98,08
b)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.650.000	91.650.000	100,00
c)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	148.790.000	99,19
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.378.566.000	795.274.199	57,69
A	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.031.856.000	669.791.599	64,91
a)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	247.850.000	172.603.999	69,64
b)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	215,290.000	102.843.000	47,77
c)	Reviu Laporan Kinerja	50.000.000	23.536.000	47,07
d)	Reviu Laporan Keuangan	142.646.000	142.646.000	100,00
e)	Pengawasan Desa	146.070.000	72.325.000	49,51
f)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	230.000.000	155.837.600	67,76
B	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	345.710.000	125.482.600	36,19
a)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	200.000.000	26.042.600	13,02
b)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	146.710.000	99.440.000	67,78
3	PROGRAM PERUMUSAN	904.650.000	650.153.273	71,87



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
A	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	370.210.000	295.677.473	79,87
a)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	248.570.000	191.467.473	77,03
b)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	121.640.000	104.210.900	85,67
B	Pendampingan dan Asistensi	534.440.000	354.475.800	66,33
a)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	163.000.000	50.600.000	31,04
b)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	121.440.000	101.622.900	83,68
c)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	250.000.000	202.252.900	80,90
TOTAL		16.951.359.490	13.412.469.938	79,12

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka kinerja dapat dibagi menjadi 5 kelompok, di atas 90% (sangat tinggi), di bawah 90% (tinggi), di bawah 75% (sedang), di bawah 65% (rendah) dan di bawah 51% (sangat rendah).

Dari tiga program yang dilaksanakan, terdapat 1 program mencapai realisasi anggaran di bawah 90% dan 2 program mencapai realisasi anggaran di bawah 75%, antara lain:



1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (81,59%)
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan (57,69%)
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (71,87%)

Realisasi untuk anggaran kegiatan, terdapat 3 kegiatan yang memiliki pencapaian realisasi di atas 90%, 3 kegiatan yang memiliki pencapaian realisasi di bawah 90%, 1 kegiatan yang memiliki pencapaian realisasi di bawah 75%, 2 kegiatan yang memiliki pencapaian realisasi di bawah 65%, dan 2 kegiatan yang memiliki pencapaian realisasi di bawah 51% antara lain:

1. Pencapaian realisasi anggaran di atas 90%:
 - a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (99,09%)
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (95,72%)
 - c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (98,54%)
2. Pencapaian realisasi anggaran di bawah 90%:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (82,21%)
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah (76,85%)
 - c. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (79,87%)
3. Pencapaian realisasi anggaran di bawah 75%
Pendampingan dan Asistensi (66,33)
4. Pencapaian realisasi anggaran dibawah (65%)
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (60,77%)
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan Internal (64,91%)



5. Pencapaian realisasi anggaran dibawah 51%

- a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (46,19%)
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (36,19%)

Realisasi untuk Sub Kegiatan, dari 31 sub kegiatan terdapat 12 sub kegiatan dengan pencapaian realisasi anggaran di atas 90%, 7 sub kegiatan dengan realisasi anggaran di bawah 90%, 4 sub kegiatan dengan realisasi anggaran di bawah 75%, 2 sub kegiatan dengan realisasi anggaran di bawah 65% dan 6 sub kegiatan dengan realisasi anggaran di bawah 51%, antara lain:

1. Pencapaian realisasi anggaran di atas 90%:
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (96,20%)
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (100%)
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100%)
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%)
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (100%)
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu (99,99%)
 - g. Pengadaan Peralatan dan Mesin (99,09%)
 - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (99,47%)
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (98,08)
 - j. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100,00%)
 - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (99,19%)
 - l. Reviu Laporan Keuangan (100,00%)
2. Pencapaian realisasi anggaran di bawah 90%:
 - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (75,58%)



- b. Penyeediaan Gaji dan Tunjangan ASN (82,21%)
 - c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (89,27%)
 - d. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (77,03%)
 - e. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (85,67%)
 - f. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (83,68%)
 - g. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (80,90%)
3. Pencapaian realisasi anggaran di bawah 75%:
- a. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (73,74%)
 - b. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (69,64%)
 - c. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (67,76%)
 - d. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (67,78%)
4. Pencapaian realisasi anggaran di bawah 65%:
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (55,21%)
 - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (51,16%)
5. Pencapaian realisasi anggaran di bawah 51%:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (11,89%)
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (47,77%)
 - c. Reviu Laporan Kinerja (47,07%)
 - d. Pengawasan Desa (49,51%)
 - e. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (13,02%)



f. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
(31,04%)

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja, dapat disimpulkan terdapat 6 sub kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran dengan kategori sangat rendah, oleh karena itu disusun analisis penyebab dari rendahnya kinerja sub kegiatan tersebut, yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (11,89%)

Realisasi anggaran pada sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai dikategorikan sangat rendah disebabkan pelaksanaan dilakukan secara E-Learning, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibiayai penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (47,77%)

Realisasi anggaran pada sub kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah dikategorikan sangat rendah disebabkan sebagian besar belanja perjalanan dinas tidak terserap karena kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lainnya, karena terdapat penugasan mandatory dari pemerintah pusat.

3. Reviu Laporan Kinerja (47,07%)

Realisasi anggaran pada sub kegiatan reviu laporan kinerja dikategorikan sangat rendah disebabkan sub kegiatan ini telah menggunakan aplikasi e-lppd, sehingga anggaran yang digunakan lebih efisien.

4. Pengawasan Desa (49,51%)

Realisasi anggaran pada sub kegiatan pengawasan desa dikategorikan sangat rendah disebabkan pelaksanaan pengawasan atas desa dari target 78 terealisasi 60 karena waktu pelaksanaan terpakai untuk pelaksanaan tugas



mandatory dari pemerintah pusat yang wajib untuk dilaksanakan.

5. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (13,02%)

Realisasi anggaran pada sub kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah berupa kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan permintaan keterangan ahli dari Aparat Penegak Hukum (APH). Sub kegiatan ini dikategorikan sangat rendah disebabkan karena realisasi dari kegiatan ini sulit untuk diprediksi, sehingga anggaran hanya dapat digunakan apabila terdapat kasus kerugian negara/daerah.

6. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (31,04%)

Realisasi anggaran pada sub kegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah dikategorikan sangat rendah disebabkan padatnya pelaksanaan tugas mandatory, sehingga pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tidak maksimal.



BAB IV *Penutup*

A. Tinjauan Umum

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2022 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas serta program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil dari analisis kinerja kegiatan dan sasaran, maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 6 sub kegiatan dari 31 sub kegiatan yang memiliki pencapaian realisasi anggaran dengan kategori sangat rendah dan dari 6 sub kegiatan tersebut, terdapat 3 sub kegiatan yang tidak efektif yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Pengawasan Desa dan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sub kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara efektif karena output dari setiap sub kegiatannya belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan, terdapat 2 sasaran strategis telah memiliki pencapaian kategori sangat baik dan 1 sasaran strategis memiliki pencapaian kategori sedang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata



Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan rata-rata keseluruhan capaian kinerja adalah sebesar 92,08%.

B. Kendala-Kendala

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya berusaha untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerjanya, sehingga Inspektorat sebagai instansi yang mempunyai peran sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah bisa efektif.

Untuk mencapai harapan tersebut tentunya tidaklah mudah. Selama ini masih terdapat beberapa hambatan yang sekaligus merupakan masalah bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugasnya, masalah tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya peran APIP dalam memberikan layanan *assurance* dan *advisory* untuk perbaikan manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. Penyebab rendahnya tingkat Kapabilitas APIP, secara umum sekurang-kurangnya terdapat dua penyebab:
 - a. kurangnya kapasitas dan pengetahuan dari manajemen APIP dalam mengelola sumber daya APIP. Hal tersebut berdampak pada kurang kapabelnya personel APIP dan tidak optimalnya fungsi *assurance* dan *consulting* yang diberikan APIP;
 - b. Kurangnya kesadaran, pemahaman, komitmen dari manajemen puncak terkait manfaat dan peran APIP.
2. Sumber Daya Manusia yang ada pada Inspektorat Daerah masih terbatas baik dalam kuantitas maupun kualitas. Secara kualitas kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan tugas pokok dan fungsi. Secara



kuantitas tenaga fungsional pengawas di Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum memadai dari kebutuhan yang seharusnya sebanyak 80 orang, sementara kondisi eksisting jumlah fungsional pengawas sebanyak 39 orang, sehingga pelaksanaan pengawasan belum dapat tertangani secara keseluruhan dengan jumlah fungsional yang ada.

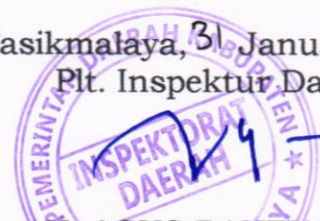
C. Strategi Pemecahan Masalah

Adapun solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan pelaksanaan program dan kegiatannya dengan meningkatkan kebutuhan Kepala Daerah selaku manajemen puncak mengenai manfaat peningkatan kemampuan dari APIP, Kepala Daerah melihat APIP sebagai mitra bisnis strategis organisasi. Kebutuhan peran APIP yang meningkat diharapkan juga dapat membangun komitmen Kepala Daerah sebagai manajemen puncak untuk menyediakan sumber daya yang memadai bagi APIP yaitu dengan tersedianya:

- a. Pemenuhan SDM APIP secara kuantitas
- b. Pelatihan untuk SDM APIP
- c. Sarana prasarana
- d. Teknologi Informasi yang memadai, terutama terkait audit kinerja, perencanaan audit berbasis risiko, dan *Quality Assurance Improvement Programs (QAIP)*.

Tasikmalaya, 31 Januari 2023

Plt. Inspektur Daerah



H. AGUS BAHTIAR, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 196602111992021001

LAMPIRAN

MATRIKS
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021-2026

NO.	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN RENSTRA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022	
								TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional									
	Meningkatkan Pengawasan, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja		Maturitas SPIP	Meningkatkan penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Meningkatkan peran APIP dalam memfasilitasi penerapan SPIP di Entitas Pemerintah Daerah dan OPD				
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan APIP	Meningkatkan koordinasi APIP dengan OPD dalam penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	100%	1.189.845.730
				Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK	Meningkatkan peran APIP dalam koordinasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK				
				Optimalisasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat atas Kerugian Daerah	Meningkatkan peran APIP dalam memberikan pelayanan pengaduan masyarakat atas Kerugian Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan Kegiatan Pengawasan Internal	100%	897.005.380
						Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	81 Laporan	161.375.500
						Sub Kegiatan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil	88 Laporan	90.535.500

NO.	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN RENSTRA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022	
								TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional									
						Kuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
						Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	25.300.000
						Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	200.887.500
						Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	105 Laporan	119.862.380
						Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	150.000.000
						Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Dokumen	149.044.500
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	292.840.350
						Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian	10 Laporan	155.105.500

NO.	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN RENSTRA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022	
								TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional									
						Negara/Daerah	Negara/Daerah		
						Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	137.734.850
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Hasil leveling lembaga pengawasan	Meningkatkan peran APIP secara efektif	Meningkatkan peran APIP dalam : Mendapat keyakinan yang memadai atas ketaatan, meningkatkan kinerja 3E, memberikan early warning, memperbaiki manajemen risiko	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN dan ASISTENSI	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah	100%	825.739.400
						Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Cakupan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%	294.056.400
						Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	213.314.200
						Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	80.742.200

NO.	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN RENSTRA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022	
								TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional									
						Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Cakupan pendampingan dan asistensi	100%	531.674.000
						Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	59 Perangkat Daerah	160.518.600
						Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	59 Perangkat Daerah	48.705.800
						Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	188.249.600
						Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi	59 Perangkat Daerah	134.200.000

NO.	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN RENSTRA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022	
								TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional									
							Penegakan Integritas		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Optimalisasi layanan pendukung urusan pemerintahan	Meningkatkan kualitas layanan pendukung urusan pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	72,5	10.710.404.454
							Nilai IKM Perangkat Daerah	81	2.919.898.222
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	25 Dokumen	110.000.000
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	88.000.000
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	22.000.000
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100%	10.600.404.454
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	64 orang/bulan	10.600.404.454

NO.	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN RENSTRA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022	
								TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional									
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN	100%	319.887.000
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	128 Paket	100.000.000
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60 Orang	153.857.000
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	60 Orang	198.018.700
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100%	1.214.954.620
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Paket	82.500.000
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor	12 Paket	148.500.000

NO.	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN RENSTRA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022	
								TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional									
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	178.023.120
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dokumen	33.000.000
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	145.293.500
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	323.488.000
						Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik	1 Dokumen	304.150.000
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100%	108.339.000
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-

NO.	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN RENSTRA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022	
								TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional									
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	26 Unit	108.339.000
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	374.364.802
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Laporan	138.744.802
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14 Laporan	235.620.000
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	770.364.100
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	34 Unit	516.720.600
							Jumlah kendaraan dinas operasional yang tepat bayar pajak	34 Unit	

NO.	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN RENSTRA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022	
								TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional									
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	40 Unit	82.500.000
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	171.143.500



**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. AGUS BAHTIAR, SE**

Jabatan : Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Tasikmalaya

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SUGIANTO**

Jabatan : Bupati Tasikmalaya

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaparna, Januari 2022

PIHAK KEDUA,


ADE SUGIANTO

PIHAK PERTAMA,


H. AGUS BAHTIAR, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19660211 199202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022**

SASARAN		SATUAN	TARGET 2021	PROGRAM	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	83	Program Penyelenggaraan Pengawasan
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 13.620.183.195
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.365.290.000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 855.000.000
TOTAL		Rp. 15.840.473.195

Singaparna, Januari 2022

PIHAK KEDUA,


ADE SUGIANTO

PIHAK PERTAMA,


H. AGUS BAHTIAR, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19660211 199202 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. AGUS BAHTIAR, SE**
Jabatan : Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Tasikmalaya
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SUGIANTO**
Jabatan : Bupati Tasikmalaya
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaparna, November 2022

PIHAK KEDUA,


ADE SUGIANTO

PIHAK PERTAMA,


H. AGUS BAHTIAR, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19660211 199202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022**

SASARAN		SATUAN	TARGET 2021	PROGRAM	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	83	Program Penyelenggaraan Pengawasan
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota


NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 14.668.143.490
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.378.566.000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 904.650.000
TOTAL		Rp. 16.951.359.490

Singaparna, November 2022

PIHAK KEDUA,


ADE SUGIANTO

PIHAK PERTAMA,


H. AGUS BAHTIAR, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19660211 199202 1 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RENJA/RKT) INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2022**

PROGRAM/KEGIATAN	IINDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	JUMLAH ANGGARAN	
			SEBELUM	SESUDAH PERUBAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	72,5 Poin	13.620.183.195	13.540.257.195
	Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Persen		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Dokumen	100.000.000	110.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	80.000.000	80.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	20.000.000	30.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai aturan	100 Persen	10.237.557.877	10.237.571.877
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	64 Orang/Bulan	10.237.557.877	10.237.571.877
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN	100 Persen	681.730.000	582.500.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	60 Orang	450.000.000	345.500.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	60 Orang	231.730.000	237.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100 Persen	1.277.195.800	1.281.935.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	75.000.000	80.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	160.000.000	160.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	181.839.200	181.839.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan	12 Dokumen	48.270.000	48.000.000

PROGRAM/KEGIATAN	IINDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	JUMLAH ANGGARAN	
			SEBELUM	SESUDAH PERUBAHAN
Perundang-undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	112.086.600	112.096.600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlaj Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000	500.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100 Persen	200,000,000	224.500.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	26 Unit	200,000,000	224.500.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	397.049.518	362.669.518
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	126.589.518	133.229.518
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	270.460.000	229.440.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	726.650.000	741.080.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional ata Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	34 Unit	500.000.000	499.430.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	221 Unit	76.650.000	91.650.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	150.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	100 Persen	1.365.290.000	1.378.566.000
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan Kegiatan Pengawasan Internal	100 Persen	1.015.290.000	1.031.856.000

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	JUMLAH ANGGARAN	
			SEBELUM	SESUDAH PERUBAHAN
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	81 Laporan	200.000.000	247.850.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	88 Laporan	165.290.000	215.290.000
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	50.000.000	50.000.000
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	150.000.000	142.646.000
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	78 Laporan	250.000.000	146.070.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	10 Dokumen	200.000.000	230.000.000
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 Persen	350.000.000	346.710.000
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	200.000.000	200.000.000
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	150.000.000	146.710.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah	100%	855.000.000	921.650.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	250.000.000	248.570.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	125.000.000	121.640.000

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	JUMLAH ANGGARAN	
			SEBELUM	SESUDAH PERUBAHAN
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Dokumen	125.000.000	118.400.000
Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	480.000.000	551.440.000
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	59 Perangkat Daerah	180.000.000	180.000.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	59 Perangkat Daerah	50.000.000	121.440.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	250.000.000	250.000.000

**PENGUKURAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2022**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran			Capaian Kinerja (%)	Keuangan		
		Uraian	Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	83%	88,92%	107,13	1.378.566.000	795.274.199	57,69
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level 3	Level 2	66,67	904.650.000	650.153.273	71,87
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55	56,34	102,44	14.668.143.490	11.967041.566	81,59

Jumlah Anggaran Program Tahun 2022 Rp. 16.951.359.490

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2022 Rp. 13.412.469.938

Plt. INSPEKTUR DAERAH,



H. AGUS BAHTIAR, SE
NIP. 19660211 199202 1 001